



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.

Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi tanaman bahan makanan di Indonesia. Penggunaan lahan sawah untuk tanaman bahan makanan di Jawa Barat menempati urutan kedua setelah Jawa Timur yaitu seluas 1.12 juta ha (BPS, 1999). Namun sebagian besar di wilayah Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang telah banyak dikonversi untuk sektor lain seperti industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain sehingga daerah-daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan tanaman bahan makanan harus disuplai dari daerah lain. Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang dalam menyediakan tanaman bahan makanan harus disuplai oleh luar wilayah. Ketersediaan tanaman bahan makanan yang dibutuhkan penduduk Kota Bogor sebagian besar tidak dapat dipenuhi oleh produksi sendiri, melainkan disuplai oleh luar wilayah seperti Kabupaten Bogor. Kota Bogor bukan merupakan daerah pertanian tetapi masalah pertanian masih sangat diupayakan dalam jajaran Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas Agribisnis karena masih ada lahan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian.

Sektor pertanian di Kota Bogor bukan merupakan sektor ekonomi yang dominan, tetapi penggunaan lahan baik sawah maupun bukan sawah masih tetap mendapat perhatian utama pemerintah daerah Kota Bogor. Pada tahun 2010 terdapat 793 ha lahan sawah dan 2 735 ha lahan bukan sawah di Kota Bogor. Selain padi dan palawija, tanaman hortikultura merupakan andalan sektor pertanian di Kota Bogor. Selain pertanian tanaman bahan makanan, sektor

pertanian dan perikanan juga masih cukup berkembang di Kota Bogor (BPS Kota Bogor, 2011). Namun Sektor pertanian merupakan sektor penting yang menyediakan kebutuhan pokok untuk tanaman bahan makanan penduduk dan sektor pertanian merupakan sektor primer yang berkontribusi nyata terhadap PDRB di Kota Bogor. Berikut ini merupakan struktur ekonomi Kota Bogor menurut kelompok sektor atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2009-2010.

Tabel 1.1. Kontribusi Sektor dalam Perekonomian Kota Bogor Tahun 2009-2010

Kode	Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
		2009*)	2010**)	2009*)	2010**)
	A. PRIMER	0.2	0.19	0.3	0.29
1	Pertanian	0.2	0.19	0.3	0.29
2	Pertambangan & Penggalian	0	0	0	0
	B. SEKUNDER	33.12	33.19	38.42	38.4
3	Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air	25.57	25.9	28.25	28.34
4	Bersih	2.06	2	3.24	3.27
5	Bangunan	5.49	5.29	6.92	6.79
	C. TERSIER	66.68	66.63	61.28	61.3
6	Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi	38.4	37.16	29.54	29.24
7	Komunikasi	14.45	15.35	10.06	10.19
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10.22	10.39	14.39	14.63
9	Jasa-jasa	3.97	3.72	7.29	7.25

*)Angka Perbaikan **)Angka Sementara
 Sumber : Dinas Pertanian Kota Bogor (2010)

Peran sektor pertanian sangat luas dan mencakup beberapa indikator. Indikator peran sektor pertanian antara lain: 1. pertanian sebagai penyerap tenaga kerja yang cukup besar, 2. pertanian merupakan penghasil makanan pokok penduduk, 3. komoditas pertanian sebagai penentu stabilitas harga. Harga produk-produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam indeks harga konsumen

sehingga dinamika sangat berpengaruh terhadap inflasi, 4. akselerasi pembangunan pertanian sangat penting untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor, 5. komoditas pertanian merupakan bahan industri manufaktur pertanian. Sektor pertanian adalah prasyarat bagi adanya sektor industri manufaktur pertanian berlanjut, 6. pertanian memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi. Keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor lain dapat dilihat dari aspek keterkaitan produksi, keterkaitan konsumsi, keterkaitan investasi, dan keterkaitan fiskal. (Setiawan, 2010)

Produksi tanaman bahan makanan di Kota Bogor yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada pada tahun 2004 yaitu tanaman padi sawah sebanyak 5 788.16 ton, jagung 1 424.28 ton, kacang tanah 59 ton, ubi kayu 5 530 ton, ubi jalar 1 219 ton, total produksi sayuran 6 332 ton dengan hasil terbanyak diperoleh dari produksi ketimun sebesar 1 700 ton dan terung sebesar 1 620 ton, total produksi buah-buahan 487 90 ton sebagian besar yang disumbang oleh produksi pepaya 80.30 ton dan rambutan sebesar 55.80 ton. Produksi beras berasal dari padi sawah. Selama periode tahun 2002 sampai 2005 produksi padi mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 produksi padi sebesar 4 035 ton, tahun 2003 menjadi 9 953.28 ton, tahun 2004 sebesar 5 788.16 ton dan pada tahun 2005 menjadi 7 185 ton. Peningkatan produksi ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman bahan makanan yang semakin bertambah. Berikut ini merupakan tabel prediksi kebutuhan konsumsi tanaman bahan makanan penduduk Kota Bogor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tabel 1.2. Prediksi Kebutuhan Konsumsi Tanaman Bahan Makanan Penduduk

Jenis Bahan Makanan	Konsumsi Tabaman (kg/kap/th)	Kebutuhan Masyarakat (ton)	Pemenuhan Produksi Lokal (ton)	Suplai Luar Daerah (ton)
Beras	109.7	91 822.66	6 290.05	92 226.35
Jagung	2.83	2 368.99	2 620.80	16 261.51
Umbi-umbian	17.8	14 897.85	1 523.26	59 885.30
Kacang-kacangan	8.31	6 995.15	51 66	13 658.53
Sayuran	50.73	42 458.88	8 295.78	45 641.95
Buah-buahan	29.41	24 614.93	3 100 00	46 158.20
Daging	5.97	4 996.63	3 091.98	5 199.82
Telur	5.24	3 858.56	0	3 858.56
Susu	1.23	1 029.45	2 148.50	1 859.42
Ikan	18.75	15 692.96	2 247.18	18 901.54

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bogor (2004)

Sektor pertanian membutuhkan dukungan dari berbagai pihak karena disamping pertanian sangat terkait dengan masalah fenomena perubahan iklim, bencana banjir, dan kekeringan terdapat fakta bahwa sebagian besar petani kita memiliki luasan lahan yang sempit, yaitu berkisar antara 0.5 ha-1 ha yang bisa disebut gurem dan terdapat sekitar 55 persen dari total petani yang ada di Indonesia. Produksi tanaman bahan makanan umumnya dihasilkan oleh petani gurem yang menggarap lahan yang relatif sempit dengan kemampuan dan keterampilan yang masih sangat terbatas serta kondisi perekonomian yang pada umumnya lemah. Hal ini menyebabkan perlunya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian. Petani dalam memproduksi lahan pertaniannya memerlukan input-input produksi dari mulai penanaman hingga pemanenan. Input produksi yang dibutuhkan seperti bibit atau benih, tenaga kerja, modal, peralatan tanam, peralatan bajak seperti traktor dan peralatan panen seperti *rice milling unit* (unit penggilingan padi) dan juga pupuk yang sangat bermanfaat untuk tanaman pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pupuk merupakan input yang penting dalam pertanian serta memiliki pengaruh nyata pada produksi dan produktifitas komoditas tanaman bahan makanan terutama komoditas padi. Pupuk yang digunakan dalam pertanian terdapat dua macam, yakni pupuk organik dan pupuk anorganik, kedua jenis pupuk ini masih digunakan oleh petani. Pupuk organik menjadi andalan petani karena selain harganya sangat terjangkau dan manfaatnya lebih dirasakan daripada pupuk industri atau pupuk anorganik tapi pupuk anorganik merupakan sarana produksi yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan oleh petani kita. Walaupun pemerintah telah gencar mengadakan sosialisasi tentang substitusi pupuk anorganik dengan pupuk organik, kenyataannya peran pupuk anorganik masih belum tergantikan oleh pupuk organik. Perhatian pemerintah terhadap pupuk ini dapat diaplikasikan melalui pemberian subsidi pupuk baik pupuk organik maupun anorganik.

Subsidi pupuk merupakan kebijakan pemerintah yang kebanyakan disorot oleh berbagai pihak, baik dari pihak petani, pemerintah itu sendiri, maupun pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari pemberian subsidi pupuk bahkan terdapat banyak pihak yang menyelewengkan atau menyalahgunakan subsidi pupuk dan pada akhirnya subsidi pupuk tersebut banyak yang tidak dinikmati oleh petani serta terdapatnya masalah penggunaan pupuk yang tidak rasional, menurut penelitian bahwa secara agronomis dibutuhkan sekitar 200-250 kg/ha, namun dewasa ini penggunaan pupuk melebihi batas toleransi tersebut, yaitu 350-450 kg/ha yang mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan tanah dan menimbulkan masalah pada lingkungan hidup.



Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus sangat berhati-hati terhadap semua kebijakan yang akan diterapkan. Kebijakan subsidi pupuk memiliki pro dan kontra dari berbagai pihak. Disatu sisi pemberian subsidi pupuk menimbulkan banyak masalah jika penggunaan, pendistribusian, dan penerapannya tidak dilakukan secara benar dan tepat sasaran tapi tidak dapat dipungkiri bahwa petani kita sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian terutama subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini merupakan penolong bagi petani dalam memproduksi hasil pertanian mereka dan pemberian subsidi pupuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja petani di Kota Bogor.

Terjadinya peningkatan maupun pengurangan subsidi dapat mempengaruhi jumlah output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian merupakan sektor primer sehingga menyebabkan banyaknya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, semakin banyaknya perhatian pemerintah melalui subsidi pupuk dibidang tanaman bahan makanan juga akan menyebabkan pendapatan masyarakat pada sektor tanaman bahan makanan juga meningkat karena output tanaman bahan makanan juga akan meningkat seiring dengan murahannya harga input-input produksi termasuk pupuk dan memudahkan petani untuk mencapai penyediaan input tersebut tapi sebaliknya jika terjadi pengurangan subsidi pupuk. Subsidi pupuk yang selama ini diberikan masih dirasakan kurang di Kota Bogor karena terkadang jumlah yang diberikan pemerintah tidak sama dengan jumlah yang diterima petani, hal ini menimbulkan masalah yang cukup besar dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi. Berikut ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

merupakan jenis pupuk, target, realisasi dan capaian pupuk bersubsidi di Kota Bogor Tahun 2010.

Tabel 1.3. Jenis Pupuk, Target, Realisasi, dan Capaian Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kota Bogor Tahun 2010

No	Jenis Pupuk	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (persen)
1	Urea	1000	951	95
2	Superphose/SP-36	182	136	75
	NPK Phonska	400	149	37
	NPK Kujang	250	-	-
	ZA	100	31	31
	Organik	100	-	-
	Jumlah	2 032	1 267	40

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bogor (2010)

Penelitian ini merupakan penelitian data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Pemerintah Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor, Badan Pusat Statistik, Departemen Pertanian serta sumber-sumber lain yang terkait. Penelitian ini penting dilakukan karena dampak dari kebijakan subsidi pupuk di Kota Bogor mempengaruhi sektor tanaman bahan makanan terutama dalam hal output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tanaman bahan makanan. Penelitian ini pada akhirnya berusaha merumuskan kebijakan subsidi pupuk yang terbaik oleh pemerintah daerah Kota Bogor disamping banyaknya permasalahan yang menyangkut subsidi pupuk, kebijakan yang baik serta tepat sasaran dengan tujuan menyejahterakan petani di Kota Bogor.

4.2. Perumusan Masalah

Kota Bogor merupakan daerah yang memiliki kebutuhan akan tanaman bahan makanan yang besar namun tidak dapat menyediakan atau memproduksi sendiri melainkan mengandalkan daerah lain dalam penyediaannya. Sektor tanaman bahan makanan di Kota Bogor memerlukan banyak perhatian serta



dukungan agar produksi tanaman bahan makanan dapat meningkat dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan tanaman bahan makanan di daerahnya sendiri dan mengurangi suplai dari daerah lain. Dukungan dan perhatian yang diperlukan berasal dari pemerintah karena disamping masalah perubahan cuaca, bencana alam dan kekeringan, sektor tanaman bahan makanan merupakan sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja di Kota Bogor dan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Bogor.

Sektor tanaman bahan makanan membutuhkan banyak input-input produksi yang terkadang menjadi hambatan petani untuk meningkatkan produksinya. Pupuk merupakan salah satu input penting dalam sektor tanaman bahan makanan terutama pertanian. Perhatian pemerintah terhadap petani yang terkait dengan pemberian pupuk adalah subsidi pupuk untuk tanaman bahan makanan. Subsidi pupuk yang diberikan selama ini oleh pemerintah Kota Bogor dapat mempengaruhi output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.

Kebijakan subsidi pupuk yang diberikan pemerintah dapat bertambah maupun berkurang. Peningkatan subsidi pupuk ini dapat berpengaruh positif bagi petani karena akan menyebabkan harga eceran pupuk menurun dan mempermudah petani dalam penyediaan input dalam produksi. Sedangkan pengurangan subsidi pupuk ini menyebabkan harga eceran pupuk meningkat. Perubahan harga pupuk akan mempengaruhi struktur biaya usaha tani padi dan permintaan pupuk menurun, hal ini akan berpengaruh pula pada output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Perlunya perhatian pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat tanpa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

harus menyebabkan kesejahteraan petani kita menurun dan kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah penyalahgunaan subsidi pupuk oleh beberapa pihak agar subsidi pupuk yang diberikan dapat diterima seluruhnya oleh petani.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana dampak dari subsidi pupuk pada sektor tanaman bahan makanan di Kota Bogor terhadap output tanaman bahan makanan itu sendiri, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana peran sektor tanaman bahan makanan terhadap perekonomian di Kota Bogor ?

Bagaimana dampak kebijakan subsidi pupuk pada sektor tanaman bahan makanan di Kota Bogor terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Menganalisis peran sektor tanaman bahan makanan terhadap perekonomian di Kota Bogor.
2. Menganalisis dampak kebijakan subsidi pupuk pada sektor tanaman bahan makanan di Kota Bogor terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki batasan-batasan, yaitu:

Data yang digunakan yaitu data sekunder tanpa adanya turun lapang langsung ke petani. Sumber data diperoleh dari Dinas Pertanian Kota

Bogor, Bappeda Kota Bogor, Badan Pusat Statistik, serta sumber-sumber lain yang terkait.

2. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran sektor tanaman bahan makanan terhadap perekonomian Kota Bogor dari tahun 2008-2012.

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan subsidi pupuk baik peningkatan maupun pengurangan subsidi pupuk di Kota Bogor terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tanaman bahan makanan.

Penelitian ini hanya menganalisis dampak kebijakan subsidi pupuk di Kota Bogor dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dan hanya pada tanaman bahan makanan.

Penelitian ini hanya menganalisis jenis pupuk urea bersubsidi karena dibanding dengan jenis pupuk yang lain pupuk urea memiliki dominasi yang cukup besar dalam subsidi pupuk di Kota Bogor atau dapat dikatakan bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk urea yang paling sering dan banyak digunakan oleh petani.

6. Aspek yang dilihat dalam penelitian ini ada empat, diantaranya:

1) Output pada sektor tanaman bahan makanan. Setelah adanya kebijakan subsidi pupuk baik terjadinya peningkatan, pengurangan maupun tetap dari subsidi tersebut, apakah output pada sektor tanaman bahan makanan juga mengalami peningkatan, pengurangan atau tetap dan seberapa besar persentasenya tiap tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- 2) Pendapatan pada sektor tanaman bahan makanan. Setelah adanya kebijakan subsidi pupuk baik terjadinya peningkatan, pengurangan maupun tetap dari subsidi tersebut, apakah pendapatan pada sektor tanaman bahan makanan juga mengalami peningkatan, pengurangan, atau tetap dan seberapa besar persentasenya tiap tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012.
- 3) Penyerapan tenaga kerja pada sektor tanaman bahan makanan. Setelah adanya kebijakan subsidi pupuk baik terjadinya peningkatan, pengurangan maupun tetap dari subsidi tersebut, apakah penyerapan tenaga kerja pada sektor tanaman bahan makanan juga mengalami peningkatan, pengurangan atau tetap dan seberapa besar persentase perubahannya tiap tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012.
- 4) Kebijakan pemerintah yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah kebijakan subsidi pupuk yang terjadi di Kota Bogor tanpa mengurangi kesejahteraan petani dan dapat meningkatkan output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tanaman bahan makanan serta menghindari *rent seeking behaviour* oleh beberapa pihak.

Penelitian ini menggunakan model Input-Output dan model tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Menurut West (1993) dalam Hadianto (2010), transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan Tabel I-O didasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- 1) Asumsi keseragaman (Homogenitas)
Artinya tiap sektor dalam perekonomian memproduksi satu output tunggal dengan struktur input tunggal.
- 2) Asumsi kesebandingan (Proporsionalitas)
Artinya dalam proses produksi, hubungan antara input dan output merupakan fungsi linier yaitu tiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik (atau turun) sebanding dengan kenaikan (atau penurunan) output tersebut.
- 3) Asumsi penjumlahan (Addivitas), asumsi ini menjelaskan bahwa dampak total pelaksanaan produksi diberbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Ini berarti diluar sistem Input-Output semua pengaruh dari luar diabaikan.

Sebagai sebuah model analisis kuantitatif, adanya asumsi-asumsi tersebut menandakan adanya keterbatasan model Input-Output itu sendiri. Asumsi keseragaman menganggap setiap sektor memiliki struktur input tunggal, maka asumsi ini tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan setiap sektor produksi untuk melakukan substitusi input, misalnya karena faktor harga yang lebih murah. Setiap sektor hanya memproduksi suatu output tunggal, maka setiap sektor tidak mungkin melakukan variasi produk. Asumsi kesebandingan menganggap rasio input-output tetap dan konstan sepanjang periode analisis, dengan demikian produsen tidak dapat menyesuaikan perubahan-perubahan inputnya atau mengubah proses produksinya. Asumsi ini tidak mempertimbangkan adanya kemajuan teknologi atau produktivitas. Selanjutnya asumsi penjumlahan menganggap proses produksi hanya dipengaruhi faktor dalam sistem input-output.

Asumsi ini tidak mempertimbangkan faktor luar yang sebenarnya berpengaruh terhadap proses produksi.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

Masyarakat Kota Bogor dapat mengetahui peran sektor tanaman bahan makanan terhadap perekonomian Kota Bogor dan dampak kebijakan subsidi pupuk pada sektor tanaman bahan makanan terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Petani dalam menggunakan subsidi pupuk secara hemat dan tidak ada pemborosan penggunaan pupuk melebihi kapasitas yang dianjurkan yang dapat merusak kesuburan tanah serta pencemaran lingkungan hidup.

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat dalam hal subsidi pupuk untuk meningkatkan output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tanaman bahan makanan di Kota Bogor serta menegaskan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi masalah subsidi pupuk yang terjadi di Kota Bogor.

4) Banyak pihak terkait serta akademisi mengembangkan pemahaman serta teknologi mengenai pupuk, alternatif pembuatan pupuk dari sumberdaya lokal dengan tujuan memudahkan petani dalam penyediaan pupuk yang merupakan salah satu solusi dalam mengatasi penurunan subsidi pupuk.